

REFLEKSI KEBUDAYAAN :

DARI POSTMODERNISME HINGGA PSEUDOSAIN

Para tamu undangan, para senator, para guru besar, pengurus dan sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya yang terhormat.

Pada hari ini, kita memperingati 70 tahun lembaga yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Tujuh puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Lembaga ini tentu telah menyaksikan pergantian generasi demi generasi ilmuwan, mengarungi cakrawala ilmu budaya yang begitu dinamis, dan beradaptasi pada lingkungan masyarakat yang senantiasa berubah. Kita telah berpikir keras, lalu memutuskan dan merumuskan kebijakan, serta kemudian mencoba menjalankannya. Rangkaian aktivitas itu berjalan berkesinambungan dan melaju semakin cepat dipacu oleh tuntutan kerja yang semakin besar. Sementara itu, bayangan yang ada dalam benak kita selalu mengandaikan apa yang sedang sibuk kita perjuangkan dan kita lakukan akan menghasilkan kemajuan atau pertumbuhan (*growth*) di bidang yang kita geluti, yaitu kebudayaan. Sebagaimana di bidang pembangunan umumnya, kemajuan atau pertumbuhan lalu menjadi obsesi yang kita kejar dengan segala cara. Seakan-akan itulah tolok ukur keberhasilan kerja kita. Di lembaga perguruan tinggi ini, peningkatan jumlah publikasi terindeks, banyaknya jumlah kelulusan, tingginya indeks prestasi mahasiswa, singkatnya masa studi mahasiswa, dan banyaknya mahasiswa yang *cum laude* seakan telah menjadi ukuran baku bagi

keberhasilan kita. Namun, di tengah keasyikan kita mengejar itu semua, kita nyaris atau bahkan mungkin sudah lupa untuk menanyakan : dimana kita sekarang ? Jika kebudayaan digambarkan sebagai perjalanan manusia untuk lebih memanusiakan manusia, apakah kemajuan yang kita hasilkan memang telah mengarah pada tujuan itu ? Jangan-jangan kemajuan yang telah kita capai selama ini ternyata justru semakin menjauhkan kita dari tujuan kebudayaan untuk memanusiakan manusia.

Hadirin yang saya muliakan

Semula saya berpikir pilihan pertanyaan “dimana kita sekarang?” tersebut di atas bersifat subyektif pribadi saya. Barangkali terbawa oleh pekerjaan saya yang seringkali harus menjelajahi wilayah-wilayah baru yang tidak jarang berupa hutan belantara atau lautan luas tak bertanda. Pengalaman saya membuktikan, meskipun didampingi pemandu handal, tidak jarang kami tersesat atau salah jalan ketika kami justru terlalu asyik dengan perjalanan itu sendiri. Bahkan, ketika kami terlalu fokus pada langkah-langkah kami dan lupa berorientasi pada tempat tujuan, kami pun melenceng dari tujuan kami. Namun, saya merasa lega ketika menyadari bahwa pertanyaan : “dimana kita sekarang ?”, ternyata tidak terlalu subyektif. Pertanyaan itu selalu menjadi hal pertama yang dipikirkan oleh para pengelola perusahaan (*corporate manager*) ketika mereka diminta untuk menyusun rancangan strategis dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya. Menurut mereka (a.l. Richardson, 2002), jawaban atas pertanyaan : “dimana kita sekarang? (*Where are we now ?*) adalah landasan utama untuk menetapkan langkah strategis untuk mencapai tujuan, sekali pun

tujuan itu sendiri bisa jadi akan berubah. Dengan pertimbangan itulah, saya memberanikan diri untuk tetap mengajukan pertanyaan bersifat refleksif ini.

Saya sadar sepenuhnya bahwa melakukan refleksi kebudayaan bukanlah laku yang ringan. Sebaliknya, refleksi kebudayaan yang komprehensif adalah upaya yang semestinya melibatkan pemikiran-pemikiran sangat luas dan perbincangan yang mendalam. Tentu hal itu tidaklah mungkin dilakukan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mengingat rentang waktu yang pendek pada pertemuan ini, saya hanya akan mencoba untuk melontarkan sejumlah gagasan pemantik sebagai bahan renungan dan perbincangan yang lebih mendalam di berbagai kesempatan lain. Selain itu, saya akan lebih memusatkan perhatian pada unsur-unsur kebudayaan yang terkait dengan profesi atau pekerjaan kita di lembaga perguruan tinggi ini, yang “kerja utamanya” (*core business*) adalah mendidik dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Di lembaga ini ilmu pengetahuan atau sains diproduksi dan direproduksi.

Hadirin yang saya muliakan

Sebelum membahas lebih jauh tentang refleksi kebudayaan ini, tentu perlu dijelaskan terlebih dahulu alur penalaran yang akan menjadi kerangka pikirnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, entitas kebudayaan dipahami secara beragam oleh banyak orang. Namun, kini tidak disangsikan lagi, kebudayaan telah diakui meliputi hampir semua aspek kehidupan manusia. Hingga beberapa dekade lalu, kebudayaan masih banyak diperbincangkan sebagai teori-teori atau sekedar aplikasi dari teori-teori tertentu, tetapi kini pemahaman kebudayaan telah melingkupi juga semua praksis kebudayaan yang

amat sangat beragam : mulai dari cara makan, berbicara, pertunjukan seni, siaran televisi, perencanaan kota, keputusan politik, dan tentu saja proses pendidikan dan pembelajaran.

Kebudayaan juga berisi sejumlah kebijakan yang menentukan arah kehidupan manusia selanjutnya (Perseun, 1976; Robbins, 2009). Kebijakan-kebijakan yang menentukan perjalanan manusia tentu diambil berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang diyakininya. Hubungan antara ilmu pengetahuan atau sains dengan penentuan kebijakan atau pembuatan keputusan dalam masyarakat ini pernah diperbincangkan oleh Paul Feyerabend maupun Harry Collins dan Robert Evans (Sorgner, 2015). Feyerabend amat mengawatirkan jikalau keterlibatan ilmu pengetahuan atau sains justru akan membahayakan keputusan masyarakat yang seharusnya demokratis, karena otoritas ilmu pengetahuan hampir selalu mengontruksi tentang mana yang paling benar, benar dan kurang benar. Sebaliknya, Collins dan Evans menganggap justru demokrasi yang membahayakan kemurnian ilmu pengetahuan dan sains yang terkadang memang tidak ingin berkompromi, alih-alih bersifat demokratis. Namun, kedua kubu ahli itu meyakini bahwa ilmu pengetahuan menjadi kekuatan dalam gerak kebudayaan. Bahkan Collins dan Evans menyatakan dengan tegas bahwa ilmu pengetahuan atau sains tidak hanya menjadi sumberdaya budaya, tetapi adalah unsur utama dari budaya itu sendiri. Dengan memiliki ilmu pengetahuan itu, manusia tidak lagi menjadi makhluk alami biasa (*somatic*), tetapi makhluk alami yang luar biasa atau *extra-somatic*. Manusia berpikir dan karena itu ia menjadi makhluk yang mampu merencanakan kehidupannya.

Van Peursen (1976) sebenarnya sudah pula menjelaskan bagaimana pentingnya peran ilmu pengetahuan terhadap perjalanan kebudayaan manusia. Ia melihat ciri suatu kebudayaan ditentukan oleh bagaimana masyarakat pendukung kebudayaan itu memahami semua gejala yang ada di luar dirinya. Karena itu, van Peursen membedakan budaya itu dalam ciri-cirinya yang bersifat mitis, ontologis, atau pun fungsional. Pada intinya, budaya mitis dilandasi oleh pengetahuan manusia yang memandang dirinya sebagai bagian yang tak terelakkan dari alam semesta. Manusia merasa terkungkung oleh kekuatan-kekuatan alam semesta, sehingga harus tunduk atau hanya mampu beradaptasi terhadapnya. Pada tahap berikutnya, manusia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam, tetapi untuk lebih memahami alam semesta, manusia harus mengambil jarak. Upaya itu dilakukan agar mereka dapat membebaskan diri dari kekuatan alam semesta dan mampu menjawab dengan lebih obyektif : apa yang ada dan terjadi di alam semesta itu sendiri. Di tahap ini, manusia selalu menanyakan tentang hakekat sesuatu (substansialis). Selanjutnya, pada tahap fungsional, manusia yang telah memahami apa yang ada dan terjadi di alam semesta serta mencoba mencari relasi dengan gejala-gejala yang dipahami dengan pemaknaan atau pemanfaatannya menjadi fungsi-fungsi tertentu. Alam pikiran fungsional ini seringkali dilihat sebagai salah satu ciri modernitas. Dari gambaran perjalanan kebudayaan menurut van Peursen ini, sekali lagi menjadi jelas bagaimana pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam menentukan arah suatu kebudayaan akan menuju.

Meskipun van Peursen melihat tahap-tahap itu merupakan suatu perubahan yang penting, tetapi tidak berarti seolah-olah manusia mengalami peningkatan dari satu tahap ke tahap yang lebih

tinggi. Ternyata setiap tahap selalu mempunyai sisi-sisi yang positif dan negatif. Karena itu, van Peursen mengingatkan agar kita tidak terlalu romantis merindukan masa lampau, tetapi juga tidak terlalu utopis mengharapkan masa depan (Peursen, 1976). Mengapa demikian? Karena, prediksi futurologi seringkali hanya disusun dengan cara meneruskan apa yang sudah dijalani kebudayaan itu dengan garis-garis lurus. Padahal, tidak jarang perjalanan budaya justru tidak berjalan lurus begitu saja, tetapi sering melengkung dan bahkan menyimpang (trajektori). Dengan demikian, utopia yang diharapkan akan terjadi hanyalah tinggal cerita indah yang tidak pernah terwujud.

Kegagalan utopis sebagaimana yang diperingatkan oleh van Peursen di atas rupanya betul terjadi terhadap modernitas, yang mulai disemaikan sejak Masa Pencerahan, beberapa abad silam. Modernitas adalah konsep yang dibangun di atas rasionalitas, sebagai buah dari keberhasilan mengembangkan pikiran-pikiran ontologis. Namun, modernitas tidak berhenti di situ. Ia melangkah setahap lagi memasuki tahap fungsionalisme sebagaimana dibuktikan dari perjalanannya yang ditandai dengan serangkaian penemuan ilmu pengetahuan yang bermuara pada Revolusi Industri. Keberhasilan yang mengagumkan itu lalu menjadi bagian dari jati diri budaya Barat. Melalui proses kolonialisme, modernism mulai meletakkan dasar-dasar hegemoninya di hampir seluruh dunia. Proses globalisasi yang meningkat pesat setelah Perang Dunia Ke-2 dan Perang Dingin usai semakin mengukuhkan hegemoni itu. Pada tahap tertentu, manusia lalu terpana dan berharap banyak pada utopia modernitas. Banyak orang merasa yakin bahwa modernisme dapat memberikan kehidupan yang lebih baik melalui teknologi dan sains, serta rekayasa

kehidupan sosial. Di bidang filsafat ilmu, pemikiran modernisme diyakini akan dapat menyediakan penjelasan yang tuntas tentang realita yang ada. Dasar pemikiran yang melandasinya dikenal sebagai positivisme yang lebih menekankan pada rasionalitas yang obyektif dengan menekankan pada kajian analitis. Kerangka pikir ini juga cenderung dikotomis, yang menjawab segala persoalan secara hitam–putih. Bahkan, dalam rasionalitas modern, pengetahuan hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode falsifikasi, yaitu cara pembuktian deduktif yang terutama ditujukan untuk mencari bukti–bukti penolakan (Popper, 2002)

Epistemologi modern sesungguhnya telah diperdebatkan dan mendapat banyak kritik dari para pemikir modernis sendiri. Mereka adalah para pemikir yang dikelompokkan sebagai modernis radikal, termasuk Karl Marx, Emile Durkheim, Jurgen Habermas, Max Weber, Max Horkheimer, Theodore Adorno, dan Luis Althusser (Crook, 1991). Pada dasarnya perdebatan berkisar pada masalah bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan keabsahannya. Dalam konteks ini, selalu dipertanyakan antara *episteme* atau pengetahuan yang diperoleh secara kritis melalui metodologi tertentu dengan *doxa* yaitu pandangan atau sekedar opini. Dalam kehidupan sosial persoalan itu menjadi sangat penting, karena pengetahuan menjadi dasar juga untuk menentukan banyak hal, termasuk keadilan (mana yang benar dan salah). Apakah memang ada pengetahuan atau kebenaran tunggal yang obyektif, sebagaimana dibayangkan oleh kaum modernis? Pertanyaan itu selalu menjadi sasaran pemikiran kritis para pemikir di Frankfurt School maupun di antara kaum post-strukturalis di Perancis (Crooke, 1991)

Sementara itu, dalam kehidupan sosial pun, masyarakat semakin merasakan bahwa ternyata modernisme terbukti tidak mampu menjadi jalan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, modernisme dengan cirinya yang lebih individualistik, materialistik, dan menjunjung kebebasan (liberalisme) justru memunculkan berbagai persoalan baru : adanya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, merosotnya rasa kemanusiaan, dan dominasi budaya Barat. Modernisme dianggap hanya menguntungkan pihak yang memiliki 'kekuatan' (*power*), sebagaimana yang terbukti dari sistem ekonomi kapitalis. Proses itu akhirnya menghadirkan dominasi dan otoritas, sambil menghilangkan kemajemukan. Dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains, ternyata rasionalitas Barat juga tidak selalu mampu menjelaskan semua fenomena yang dihadapi manusia. Pengetahuan yang didapat dengan metodologi "obyektif", belum tentu obyektif juga. Alasannya, dalam setiap konstruksi pengetahuan itu sudah ada muatan subyektivitas tertentu. Apa yang disebut kepastian saintifik (*episteme*) ternyata juga suatu pandangan yang sudah bias (*doxa*). Di sinilah muncul wacana tentang krisis legitimasi ilmu pengetahuan atau sains. Aturan main dalam mengonstruksi pengetahuan justru adalah proses legitimasi itu sendiri. Karena itu, konstruksi pengetahuan modernisme dituduh sebagai upaya melanggengkan dominasi narasi besar (*grand-narrative*) modernisme itu sendiri.

Penyangkalan terhadap landasan pikir modernisme itu semakin mengkrystal dan muncul sebagai post-modernisme. Fenomena ini hadir hampir bersamaan di berbagai bidang kehidupan: seni rupa, arsitektur, fisika, sastra, mode, musik, dan filsafat ilmu.

Istilah post-modernisme di ranah keilmuan mulai dipopulerkan oleh Jean-Francois Lyotard, ketika ia menulis bukunya *La Condition Postmoderne* pada tahun 1979. Gagasan Lyotard berpusat pada pemikiran bahwa realitas adalah suatu fenomena yang tidak dapat direspresentasikan secara tepat melalui teori rasionalitas sebagaimana yang diasumsikan oleh modernisme. Ia pun mempertanyakan tentang legitimasi pengetahuan sebagaimana diajukan Habermas dan menyoal tentang kekuatan penalaran (*power of reason*). Pemahaman tentang sesuatu tidak hanya dapat diperoleh melalui penalaran, tetapi juga cara lainnya seperti sensasi dan emosi. Seakan akan segala sesuatu dapat diukur dengan cara dan ukuran yang sama, padahal tidak. Beda antara pengetahuan yang satu dengan lainnya disebabkan adanya “permainan bahasa” atau *language games* dengan aturan masing-masing. Misalnya, ada perbedaan “aturan bahasa” antara para filsuf (*philosopher*) dan pakar (*experts*). Karena itu, Lyotard lalu menekankan perlunya sikap kritis atau bahkan ketidakpercayaan terhadap metanarasi yang telah disusun selama ini (modernisme). Untuk itu, ia membukakan pintu bagi pandangan-pandangan yang berbeda (*differend*). Sikap ini menunjukkan pengakuan dan sekaligus undangan terhadap keberagaman (*heterogeneity*). Dalam konteks itu, Lyotard (1984 : xxv) menyatakan :

“Post-modern knowledge is not simply a tool of the authorities; its refine our sensitivity to differences and reinforce our ability to tolerate the incommensurable”

Memang post-modernisme bukan hanya Lyotard. Di balik post-modernisme ada beragam buah pemikiran dari berbagai tokoh lainnya, terutama dari Perancis, seperti Jean Baudillard, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, dan Michel Foucault (Crook, 1991; Aylesworth, 2015). Sebagaimana nama yang disandangnya, post-modernisme sesungguhnya adalah kelanjutan dari modernism. Hanya saja, post-modernisme berhasil mempertajam kritik yang telah dikemukakan kelompok modernis radikal, khususnya Althusser. Semua gagasan para pemikir itu tentu tidak mungkin dapat diperbincangkan di sini. Yang dapat dikemukakan di sini hanyalah gambaran umum tentang keadaan post-modernisme itu.

Sebagai reaksi terhadap modernisme, post-modernisme cenderung mempunyai sifat kritis dan dekonstruktif. Gagasan-gagasan yang berkembang hampir selalu bertolak belakang dengan pemikiran modernisme. Dasar pikir post-modernisme menempatkan pengetahuan sebagai sesuatu yang subyektif, tidak pernah obyektif. Bahkan apa yang disebut ‘fakta’ belum tentu sama bagi semua orang. Artinya, tergantung pada siapa yang memaknai (*relativism*). Akibatnya, “kebenaran” juga bersifat relatif. Legitimasi akan pengetahuan sangat tergantung pada konteks-nya masing-masing dan bersifat reflektif. Karena itu, post-modernisme menolak cara pikir yang normatif deterministik dan anggapan adanya kebenaran tunggal seperti yang ditawarkan positivisme. Sebaliknya, post-modernisme berupaya menampung berbagai pemikiran yang berspektrum luas (multidisiplin, transdisiplin) dan menganggap apa yang benar bersifat jamak (pluralistik), termasuk menampung berbagai pandangan alternatif seperti feminisme, pribumi (*indigenous*), dan yang tak-terrepresentasikan (*unrepresented*). Dengan cara itu, mereka berharap

akan mampu merepresentasikan beragam suara yang sebenarnya ada (*multivocal*). Semua ciri tersebut tentu saja mencitrakan post-modernisme sebagai sosok yang lebih demokratis dan berbudaya (disarikan dari berbagai bacaan, antara lain Aylesworth, 2015; Lyotard, 1984; Friedman, 1994; Foucault, 1972; Nikkel, nd ; Hodder, 1991).

Sokal (2004) secara lebih tajam menunjukkan bahwa post-modernisme merupakan penolakan eksplisit terhadap rasionalitas Masa Pencerahan, melalui wacana atau diskursus teoritikal atau bukan pada ranah pengujian data empiris, tetapi lebih berlandaskan pada anggapan relativisme budaya dan pengetahuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan sains dianggap tidak berbeda dengan narasi, mitos atau konstruksi sosial lainnya. “Kebenaran” tergantung pada kelompok sosial, sehingga lebih dinilai secara moral atau etik dari pada data empiris atau pengetahuan yang ada. Sokal lalu memberikan contoh beberapa pendapat postmodernisme yang mencerminkan hal itu, di antaranya bahwa pengetahuan sains tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenyataan alam; dunia alami tidak atau hanya sedikit berperan dalam menciptakan pengetahuan; atau sesungguhnya tidak ada baku mutu tentang apa yang rasional, karena yang ada adalah rasionalitas setempat. Postmodernisme melihat sains melegitimasi dirinya sendiri, dengan menghubungkan temuannya terhadap kekuasaan tertentu. Hubungan inilah yang sesungguhnya menentukan apakah suatu pengetahuan absah (*valid*) atau tidak.

Para hadirin yang saya muliakan,

Di tengah tawaran post-modernisme yang membuka peluang luas bagi relativisme, multivokalitas, pluralisme, dan pendekatan

multi- maupun trans-disiplin itulah, pengetahuan yang digolongkan sebagai pseudosain menjadi semakin merebak luas. Istilah pseudosain sendiri pertama kali digunakan oleh sejarawan James Andrew pada tahun 1796 untuk menyebut alkemia¹ sebagai “pseudosain yang fantastik”. Sejak akhir abad ke-19, istilah ini banyak digunakan dengan kesan yang semakin “miring”. Meskipun demikian, batas antara sains dan pseudosain sebenarnya cukup tipis (Sokal, 2004; Raff, 2013; Hansson, 2014; Beyerstein, 1996). Dalam khasanah ilmu pengetahuan atau sains memang ada demarkasi (Hansson, 2014) yang membedakan antara bukan-sains (*non-science*, misalnya agama dan metafisik) dengan tidak saintifik (*unscientific*; tidak mengikuti atau konflik dengan kaidah ilmiah). Pseudo-sains adalah bagian kecil dari kelompok tidak ilmiah. Secara umum, pseudo-sains selalu memberikan kesan seolah-olah memiliki dasar-dasar penalaran yang sesuai dengan penalaran ilmu pengetahuan atau sains umumnya. Pseudosains juga cenderung menonjolkan metodologi yang canggih dan akurat, serta berada di bawah otoritas ilmu tertentu. Seringkali sebagai pengganti otoritas, pseudosains mengaku temuannya berasal dari kearifan masa lampau yang hilang. Pelaku pseudosains biasanya menganggap dirinya seolah telah meruntuhkan teori lama dan temuan barunya itu seolah mampu menjawab aneka persoalan atau menjelaskan misteri yang selama ini belum terpecahkan.

Namun, kesan kehebatan temuannya itu sesungguhnya menyembunyikan sejumlah kelemahan, di antaranya : tidak didukung

¹ Alkemia adalah ilmu “kimia” dalam abad pertengahan yang ditujukan untuk mengubah segala logam untuk menjadi emas.

data yang cukup kuat, menggunakan data dengan cara yang tidak tepat, atau data ditafsirkan sesuai dengan kerangka pikirnya. Pseudosain biasanya tidak mampu bersifat prediktif, pernyataan-pernyataannya sulit dikonfirmasi, dan tidak mau mendengar pendapat yang menunjukkan kelemahannya. Walaupun merasa mengubah pengetahuan lama, pseudosain jarang mampu memberikan penjelasan mengapa gagasan lama itu salah dan harus diganti. Padahal, gagasan lama itu telah didukung oleh banyak data yang terakumulasi cukup lama. Selain itu, di balik pernyataan temuan baru itu tidak jarang terdapat dorongan tidak-ilmiah, baik itu bersifat ideologis, politik, maupun finansial. Alih-alih melakukan kritik pada dirinya, pelaku pseudosain paling suka menganggap dirinya sebagai korban represi otoritas yang telah mapan. Mereka mengalami *Galileo syndrome*, yaitu merasa dihujat, dikucilkan, dan dihukum karena tidak sejalan dengan arus utama pengetahuan. Meskipun begitu, mereka yakin pada suatu saat pendapatnya terbukti benar.

Bagi para pelaku pseudosain, munculnya post-modernisme tentu ibarat “orang mengantuk disorong bantal”. Dengan memosisikan diri sebagai penghasil gagasan alternatif yang “tertindas”, kini bagi mereka seakan dibukakan ruang representasi yang semakin luas. Keberhasilan post-modernisme seakan menyeret pseudosain pada posisi yang hampir sejajar dengan sains umumnya. Pelaku pseudosain acapkali menggunakan gagasan postmodernisme untuk menjustifikasi pendapatnya. Padahal, sesungguhnya kerangka pikir postmodernisme berbeda sama sekali dengan pseudosain. Bahkan Sokal (2004) menyatakan dengan tegas bahwa “*Pseudoscience is not postmodernism*”. Alasannya, pseudosain selalu mendaku bahwa pendapat atau pengetahuan yang diperoleh adalah

objektif. Padahal, postmodernisme justru menyangkal adanya pengetahuan yang objektif. Perbedaan lain, postmodernisme menuntut pikiran yang selalu kritis, bagi pseudosain hal itu tidak pernah terpikirkan. Mungkin memang benar bahwa postmodern tidak menciptakan pseudosain, tidak pula mempromosikannya. Namun, postmodernisme telah melemahkan landasan moral dan penalaran ilmiah yang selama ini dianut. Dengan begitu, postmodernisme telah membantu pseudosain untuk lebih berkembang. Apalagi, dengan misi multivokal-nya, postmodernisme telah mengakui bahwa pseudosain layak untuk disuarakan juga. Meminjam kalimat Bertrand Russel, Sokal (2004) menyatakan bahwa postmodernisme “telah menciptakan lautan kegilaan yang sangat membahayakan kapal kecil rasionalitas manusia”.

Hadirin yang saya hormati

Barangkali peserta sidang ini mulai mempertanyakan: mengapa kita harus peduli atau bahkan resah dengan semakin maraknya kehadiran pseudosain? Mengapa tidak kita biarkan saja pseudosain sama seperti suara-suara yang lain, agar cita-cita demokrasi dapat tercapai? Kiranya kita sudah sepakat bahwa demokrasi, kesetaraan, dan peduli pada “yang lain” sangat perlu diperjuangkan. Namun, watak dari pseudosain tidaklah murni mencari pengetahuan baru yang lebih baik sebagaimana wacana postmodernisme Lyotard (1984). Tidak seperti postmodernisme yang akan mempertahankan keberagaman, pada saatnya pseudosain akan dapat menjadi hegemoni baru dalam wacana pengetahuan. Keadaan ini tentu akan menghilangkan cita-cita demokrasi dan kesetaraan. Apalagi, kini tanda-tanda itu telah tampak dari banyaknya pemikiran

pseudosain yang merasuki kehidupan masyarakat melalui iklan konsumtif, pengobatan alternatif, saksi ahli dalam persidangan, kebijakan lingkungan, rasialisme, agama, dan tentu saja kemelencengan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Perlu disadari, pseudosain kini telah mampu mengonstruksi pengambilan keputusan terkait kebijakan yang menentukan jalan dan arah kebudayaan kita mendatang (Sokal, 2004; Hansson, 2014; Raff, 2013). Di Indonesia, kita telah menyaksikan bersama bagaimana pseudosain telah mempengaruhi kebijakan pemerintah setidaknya dalam kasus “*blue energy*” (air menjadi bahan bakar) dan situs Gunung Padang yang didaku sebagai piramida tertua di dunia dengan kandungan logam mulia ribuan kilogram.

Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan perjalanan kebudayaan kita dibimbing oleh buah-buah pikiran pseudosain ? Relakah arah kebudayaan kita dipandu oleh mitos-mitos baru yang tidak pernah secara terbuka diwacanakan dalam suasana lebih dialektis ? Dan, apakah buah-buah pikiran pseudosain akan menghantarkan kebudayaan kita menjadi sarana untuk lebih memmanusiakan diri kita ?

Hadirin yang saya muliakan

Dalam konteks situasi seperti dijelaskan di atas itulah, sesungguhnya pertanyaan refleksif yang saya ajukan pada awal presentasi ini menemukan relevansinya. Dimana kita sekarang ? Apa peran yang sedang kita jalankan dalam situasi seperti ini ? Apakah kemajuan yang kita capai memang mengarah pada tujuan-tujuan kita atau justru membawa kita melenceng jauh ? Sebenarnya, bukanlah kewenangan saya untuk menjawab pertanyaan ini untuk kita semua.

Namun, harus saya akui sejujurnya bahwa ada kekawatiran pribadi yang besar saat melihat dan terlibat dalam sistem dan kebijakan perguruan tinggi di Indonesia. Semakin nyata di benak saya bahwa pendidikan tinggi kita dibiarkan terbawa oleh arus kuat globalisasi yang agaknya menyeret tujuan pendidikan kita melenceng dari tujuan semula.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah Indonesia diberi mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat ini dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada kenyataannya, kini kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan dorongan yang amat besar agar universitas di Indonesia mencapai ranking yang cukup bergengsi di dunia. Begitu banyak sumberdaya dan energi yang dikerahkan untuk mencapai itu. Bahkan, kinerja perguruan tinggi juga diukur dari ranking dunia itu. Di sini, tampak bagaimana para pengambil kebijakan pendidikan telah dikonstruksi oleh mitos-mitos baru pseudosain tentang keberhasilan pendidikan. Mengapa saya katakan demikian ? Pertama, seperti dalam pseudosain, proposisi bahwa universitas ranking atas berkinerja lebih baik dari ranking bawah tidak bisa difalsifikasi. Sebaliknya, proposisi itu tidak juga dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Karena itu, tolok ukur ranking perguruan tinggi adalah pseudosain yang tidak dapat dilegitimasi. Kedua, kita lupa apa yang dinyatakan oleh Lyotard bahwa kebenaran pengetahuan seharusnya justru ditentukan oleh

legitimasi lokal. Artinya, apabila tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi sangat tidak tepat jika kita menggunakan ukuran ranking dunia. Semestinya, untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan kita, legitimasinya ada di Indonesia sendiri. Untuk itu, kita sendiri yang semestinya mengembangkan tolok ukur kita sendiri, bukannya justru menggunakan tolok ukur orang lain.

Kalau kita tidak ingin terjebak untuk merujuk mitos-mitos pseudosain seperti saya tuduhkan di atas, Kemenristekdikti seharusnya sudah mencoba melakukan konfirmasi : apakah perguruan tinggi dengan ranking dunia yang tinggi memang menunjukkan kinerja tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia? Yang saya takutkan adalah justru sebaliknya. Banyak perguruan tinggi yang terlalu suntuk mengejar ranking tinggi, sehingga mereka lupa tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang sama akan dapat terjadi ketika kinerja perguruan tinggi diukur dengan jumlah lulusan yang banyak dengan predikat *cum laude* atau ber-indeks prestasi tinggi. Tidak sedikit perguruan tinggi yang lalu lebih memilih memberikan nilai tinggi pada mahasiswa agar tercapai kinerja yang tinggi. Mereka lupa dengan esensi standar sebagai tolok ukur kualitas hasil pendidikan. Akibatnya, dapat saja terjadi perguruan tinggi yang memiliki kinerja bagus, ternyata menghasilkan lulusan yang kurang berkualitas.

Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yang juga berpotensi menyuburkan pseudo sain adalah pemberian insentif yang besar demi obsesi meningkatkan publikasi di jurnal terakreditasi atau berindeks internasional, khususnya Scopus. Semua perguruan tinggi

seakan berlomba untuk sebanyak-banyaknya mempublikasikan karya staf pendidik mereka di jurnal. Dengan demikian, penemuan dan pengetahuan baru yang ilmiah cenderung hanya diketahui oleh rekan selingkungnya (*peer*). Semua itu hanya berputar di sekitar dan di dalam menara gading. Hampir dipastikan, masyarakat luas tidak akan mengakses penemuan baru yang ilmiah. Sebagai gantinya, masyarakat akan menyerap lebih banyak pengetahuan pseudo sains. Ini sejalan dengan pendapat Sokal (2004) yang menyatakan bahwa masyarakat merasa “*doing real science is difficult*”. Karena itu, mereka lebih memilih mengonsumsi pemikiran dan pengetahuan yang mudah dicerna, tampak ilmiah, dan dipahami sebagai hasil penemuan baru yang revolusioner. Semua itu dapat diperoleh dalam pseudosains. Karena itu, kini makin banyak keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan pseudosains daripada kajian ilmiah. Untuk menghindari gejala ini semakin luas, sebaiknya akademisi tidak hanya berpikir untuk menerbitkan karyanya dalam jurnal akademis, tetapi dalam bentuk karya tulis ilmiah populer yang berpotensi lebih besar mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, kita juga akan memperkecil kemungkinan pengetahuan pseudosains menjadi dasar pikir yang mengarahkan kebudayaan kita ke depan.

Hadirin yang saya muliakan

Akhirnya, setiap orang dari kita boleh mempertanyakan pada diri sendiri: sebenarnya untuk apa kita memproduksi dan mereproduksi pengetahuan? Menurut Lyotard (Frederick, 1984), dalam kondisi postmodern, kerja ilmiah sebenarnya tidak untuk menghasilkan model pengetahuan yang mantap atau mendeskripsikan ulang realita di luar sana, tetapi kerja untuk sekedar

menambah lebih banyak pekerjaan, atau menghasilkan lebih banyak pengetahuan ilmiah baru, dan memastikan bahwa kita akan selalu memiliki gagasan baru. Apakah etos seperti itu yang kini mendorong kita? Atau, kita sebenarnya sedang berperan sebagai para pelaku pseudosain yang menciptakan pengetahuan dengan tujuan ideologis, sosial, atau finansial? Jawaban atas pertanyaan ini, niscaya akan mempengaruhi jalannya kebudayaan kita di masa mendatang.

Para tamu undangan, para senator, para guru besar, pengurus dan sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya yang terhormat

Sebagai penutup perbincangan ini, ada baiknya saya ingatkan kembali cerita tentang karya genius Isaac Newton. Pemikiran Newton tentang gravitasi yang ditulis dalam *Principia* pernah diserahkan kepada para ahli fisika di Cambridge University, setelah Newton wafat. Pemikiran Newton tidak diterima, sehingga semua berkasnya dikembalikan ke keluarganya. Berkas-berkas itu sempat berada di gudang keluarga. Sekitar tahun 1930an keluarganya mulai menjual berkas-berkas itu di tukang loak dan setelah Perang Dunia II muncul di toko buku antik. Baru di toko antik itulah, karya-karya Newton dikenali oleh para ilmuwan di jaman itu. Mereka mulai menganalisis isinya dan menyusunnya menjadi karya monumental dalam bidang fisika. Noam Chomsky (2011) mengatakan kejadian seperti itu banyak dialami oleh para ilmuwan yang gagasannya luarbiasa. Karyanya tidak ditemukan di jurnal-jurnal bermartabat, tetapi justru di tengah masyarakat. Barangkali moral yang hendak disampaikan adalah berkarya dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains tidak dapat dipisah dari kondisi keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Demikianlah beberapa pemantik pikir yang dapat kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini. Saya mohon maaf, apabila selama mengantarkan perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.

DAUD ARIS TANUDIRJO

DAFTAR RUJUKAN

- Aylesworth, G. 2015. Post-modernism, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, versi revisi terakhir 5 Februari 2015. (<http://plato.stanford.edu/index.html>)
- Beyerstein, B.L. 1996. Distinguishing Science to Pseudoscience. An article prepared for the Centre for Curriculum and Professional Development Victoria Canada.
- Chomsky, N. 2011. *How the World Works*. Hamish Hamilton.
- Crook, S. 1991. *Modernist Radicalism and Its Aftermath*. Routledge.
- Faucoult, M. 1972. *The Archaeology of Knowledge*. Tavistock Publisher.
- Frederick, J. 1984. Foreword, dalam Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester University Press, hal. vii - xxi
- Hansson, S.O. 2014. Science and Pseudo-science. Stanford Centre for the Study of Language and information.
- Hodder, I. 1991. Post-modernism, post-structuralism, and post-processual archaeology dalam Ian Hodder (ed.) *The Meaning of things*. London: Harper Collins
- Lyotard, J-F. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester University Press. Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Geoff Bennington and Brian Massumi

- Nikkel, D. nd. Discerning the Spirits of Modernity and Postmodernity, *Tradition & Discovery: The Polanyi Society Periodical*, 33 : 1, hal. 8 – 26.
- Peursen, C.A. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Penerbit Kanisius – BPK Gunung Mulia.
- Popper, K. 2002. *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge Classic.
- Raff, J. 2013. What’s the difference between science and pseudo-science ? *Violence Metaphores*. (<http://violentmetaphors.com/2013/05/17/whats-the-difference-between-science-and-pseudo-science>)
- Richardson, B. 2008. *What project manager Needs to know about Strategic Planning*. Institute for Learning – Microsoft. (<http://download.microsoft.com>)
- Robbins, R.H. 2009. *Cultural Anthropology : A problem-based approach*. Cengage Advantage Books.
- Sokal, A.D. 2004. Pseudo-science and Post-modernisme : Antagonist or Fellow Travelers ? dalam G. Fagan (ed.), *Archaeology Fantasies : How Pseudo-archaeology Misrepresents the Past dan Mislead the Public*.
- Sorgner, H. 2015. Challenging expertise : Paul Feyerabend vs. Harry Collins & Robert Evans on scientific authority and public participation, *Studies in History and Philosophy of Science*, xxx (2015), hal. 1 – 7.